

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Oleh:

NURUL INDAH SARI
NIM:0501162174

PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN

2020

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Ekonomi Islam**

Oleh:

**NURUL INDAH SARI
NIM:0501162174**

**PROGRAM STUDI
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SILIH NARA
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Oleh :

Nurul Indah Sari
Nim : 0501162174

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 28 Juli 2020

Pembimbing I



Dr. Isnaini Harahap, MA
NIDN. 2020077503

Pembimbing II



Tri Inda Fadhilah Rahma, SEI, M.E.I
NIDN. 2029019101

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



Dr. Marliyah, M.Ag
NIDN. 2026017602

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH” an. Nurul Indah Sari, NIM:0501162174 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan pada tanggal 31 Agustus 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 31 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua

Dr. Marliyah, M.Ag
NIDN. 2026017602

Sekretaris

Muhammad Lathief Ilhamy Nst, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota

Pembimbing I

Dr. Isnaini Harahap, MA
NIDN. 2020077503

Penguji I

Zuhrinal M Nawawi, MA
NIDN. 2018087601

Pembimbing II

Tri Inda Fadhila Rahma, M.E.I
NIDN. 2029019101

Penguji II

Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si
NIDN. 2028129001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
UINSU Medan

Dr. Andri Soemitra, M.Ag
NIDN. 2007057602

ABSTRAK

Nurul Indah Sari, 0501162174. Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Kemiskinan yang masih fluktuatif dalam hal ini bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan konsumsi keluarga. Namun kenyataan yang terjadi masih banyak masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara, sebab adanya ketidaktepatan penyaluran, waktu, dan jumlah bantuan yang disalurkan bagi masyarakat miskin. Adapun rumusan masalah : Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Silih Nara, bagaimana dampak dengan adanya PKH di Kecamatan Silih Nara, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PKH, dan bagaimana keefektifan PKH di Kecamatan Silih Nara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan efektivitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan dan untuk mengetahui dampak serta hambatan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dengan informan sebanyak 50 orang peserta PKH. Untuk menganalisa data penulis menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dari rata-rata yang dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara kurang terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penetapan peserta PKH, serta tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Kemudian ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping PKH dan peserta PKH antara lain: belum adanya kesadaran dari peserta, kurangnya sosialisasi dari pendamping, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.

Kata Kunci: *Efektivitas, PKH, kemiskinan*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta tidak lupa shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia sebagai ajaran Rahmatallil'alamini. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah: Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, semangat, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Yang teristimewa orang tua penulis, Ayahanda tercinta Hariadi, dan Ibunda tercinta Latifah Hanum, serta Adik tercinta Nurul Mutiarani juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a, semangat, nasihat, bantuan baik berupa moril maupun materil untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas di perkuliahan sehingga dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Selain itu, dalam menyelesaikan ini penulis juga banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis turut mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Dr. Marliyah, MA. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
4. Ibu Annio Indah Lestari Nasution, SE, MSi. Selaku Pembimbing Akademik saya

5. Ibu Dr. Isnaini Harahap, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Tri Inda Fadhilah Rahma, M.E.I. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Jurusan Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Keluarga saya tercinta yang selalu memotivasi (Ayah dan Ibu, serta adik)
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam-D

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Semoga kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2020

Nurul Indah Sari
Nim. 0501162174

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENHESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kemiskinan	11
1. Definisi Kemiskinan.....	11
2. Bentuk-bentuk Kemiskinan.....	11
3. Penyebab Kemiskinan	12
4. Ukuran Kemiskinan	13
5. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam	14
6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menurut Alqur'an	16
B. Kesejahteraan	18
1. Definisi Kesejahteraan	18
2. Indikator Kesejahteraan	20
3. Tujuan Kesejahteraan.....	21
C. Program Keluarga Harapan (PKH)	22
1. PKH Aspek Kesehatan.....	23
2. PKH Aspek Pendidikan	23
3. PKH Aspek Kesejahteraan Sosial	24
4. Tujuan dan Sasaran PKH	24

5. Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKH	25
6. Hak dan Kewajiban KPM PKH	26
7. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH.....	27
8. Besaran Bantuan.....	27
9. Efektivitas PKH	27
D. Kajian Terdahulu.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
1. Gambaran Umum Kecamatan Silih Nara.....	40
2. Gambaran PKH di Kecamatan Silih Nara.....	45
3. Karakteristik Informan	48
B. Pembahasan	50
1. Analisis Dampak PKH	50
2. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PKH	51
3. Analisis Efektivitas Implementasi PKH	54
4. Implementasi PKH dalam Perspektif Islam	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TABEL

Table 1.....	3
Table 2.....	4
Table 3.....	4
Table 4.....	7
Table 5.....	27
Table 6.....	29
Table 7.....	41
Table 8.....	43
Table 9.....	43
Table 10.....	46
Table 11.....	48
Table 12.....	49
Table 13.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tingkat Kesejahteraan.....	19
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia.¹ Kemiskinan juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang disebabkan karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil.

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Kemiskinan di sebut-sebut juga sebagai pangkal munculnya berbagai masalah sosial. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di zaman globalisasi seperti saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita suatu negara.

Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi.² Kemiskinan ditandai dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan aspek lainnya.

¹ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang : UIN Maliki Press, 2011), h. 13.

² Dyah Ayu Virgoreta dkk, “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Bije Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*” (dalam jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya), h. 1.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam menganggap sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama manusia lainnya. Islam juga mengatur tentang bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infak, dan sedekah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infak. Dimana infak merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat terlepas dari kemiskinan.³

Sejak tahun 1990-an, sebagian masyarakat Provinsi Aceh berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan konflik yang berkepanjangan di daerah tersebut. Selain itu, musibah gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 yang lalu juga telah banyak menghancurkan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga jumlah penduduk miskin terus bertambah. Seiring dengan pembangunan Aceh pasca konflik dan tsunami, maka pemerintah daerah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan.⁴

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah melalui berbagai program kerja baik dalam bentuk program daerah maupun program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah, yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun hingga saat ini angka kemiskinan di Provinsi Aceh tetap tinggi. Bahkan presentase penduduk miskin di Provinsi Aceh berada

³ Munawwarah Sahib. “*Pengaruh Kebijakan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*,” (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2016),h. 6.

⁴ Basyir, Abubakar Hamzah, dkk. “*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh*” (dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala), h. 1.

pada peringkat kelima di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berikut ini merupakan presentase penduduk miskin di Aceh yang cenderung mengalami penurunan selama periode tahun 2012-2017 seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Table 1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin (persen)
1	2012	876,55	17,60
2	2013	856,80	17,60
3	2014	837,30	18,05
4	2015	851,58	17,80
5	2016	848,44	16,73
6	2017	872,61	16,89
7	2018	839,49	15,97
8	2019	819,44	15,32

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Tingginya angka kemiskinan di Aceh menunjukkan program pembangunan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal, terutama program penanggulangan kemiskinan. Padahal pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai macam program baik yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk Kabupaten Aceh Tengah pada dasarnya mengalami kemajuan dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam menanggulangi kemiskinan daerah, ditambah peran serta masyarakat dan partisipasi berbagai *stakeholder* bersinergi untuk melaksanakan

penanggulangan kemiskinan.⁵ Untuk lebih jelasnya presentasi penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Tengah

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
1	2014	192.204	16,99
2	2015	196.090	17,51
3	2016	200.412	16,64
4	2017	204.273	16,48

Sumber: BPS Aceh Tengah

Berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dapat digunakan sebagai pembandingan untuk mengetahui sebaran kemiskinan per kecamatan yang dihitung berdasarkan penghasilan secara skala nasional, sebarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3
Informasi Status Kesejahteraan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				Jumlah Individu			
	Kel 1	Kel 2	Kel 3	Jumlah	Kel 1	Kel 2	Kel 3	Jumlah
Linge	509	309	315	1.133	2367	1207	1200	4774
Atu Lintang	205	193	235	633	904	771	882	2557
Jagong Jeget	403	248	266	917	1722	952	980	3654
Bintang	850	385	302	1537	3802	1477	1024	6303
Lut Tawar	386	190	214	790	1876	842	811	3529
Kebayakan	337	206	227	770	1512	819	813	3144

⁵ Qanun RPI2JM Aceh Tengah Tahun 2016-2020

Pegasing	743	417	433	1593	3498	1724	1663	6885
Bies	189	128	147	464	847	517	539	1903
Bebesen	520	307	431	1258	2569	1288	1713	5570
Kute Panang	332	180	134	646	1415	641	443	2499
Silih Nara	1224	460	342	2026	5358	1712	1181	8251
Ketol	345	160	147	652	1543	614	490	2647
Celala	706	299	264	1269	3108	1116	922	5146
Rusip Antara	473	243	268	984	2020	907	968	3895

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial

Catatan:

Kel 1: Rumah tangga / individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia

Kel 2: Rumah tangga / individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia

Kel 3: Rumah tangga / individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia

Dari tabel di atas jumlah rumah tangga/individu tertinggi dengan kondisi kesejahteraan terendah (1, 2, dan 3) terdapat di Kecamatan Silih Nara, ini dapat diartikan sebagai kecamatan dengan jumlah terbesar rumah tangga/individu miskin terbesar di Kabupaten Aceh Tengah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program pembangunan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah

meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).⁶

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan di Indonesia dicanangkan untuk membantu penduduk miskin klaster terbawah berupa bantuan masyarakat. Program ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium yaitu seperti pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.⁷

Fokus Program Keluarga Harapan adalah pada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) penerima bantuan yang memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, ketidakberdayaan, dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin. RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) merupakan penerima bantuan PKH yang memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. PKH memiliki manfaat yakni memberikan *income effect* kepada RTSM melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.⁸

Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2007 dan sudah dilaksanakan di wilayah Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah Kecamatan Silih Nara merupakan wilayah tertinggal yang termasuk ke dalam salah satu sasaran Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk

⁶ Dyah Ayu Virgoreta, h. 2.

⁷ Farida Umaroh dan Sri Sutjiatmi, "Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal" (dalam jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti), h. 2.

⁸ *Ibid*, h. 2.

meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat di Kecamatan Silih Nara yang selama ini menjadi masalah terbesar bagi keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah telah dilakukan sejak tahun 2015, berikut ini adalah data penerima Program Keluarga Harapan Kecamatan Silih Nara:

Table 4
Jumlah Penerima PKH Kecamatan Silih Nara

No	Tahun	Jumlah penduduk	Jumlah penduduk miskin	Jumlah penerima PKH
1	2015	22.945	2.048	1.200
2	2016	23.479	2.029	1.200
3	2017	23.905	2.056	1.200
4	2018	24.356	2.087	1.296
5	2019	24.994	2.063	1.349

Sumber: BPS Aceh Tengah dan TNP2K Kec. Silih Nara

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwasanya jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara pada umumnya mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori Todaro bahwasanya semakin bertambah kesempatan pendidikan maka semakin cepat pula proses pembangunannya. Lincoln menjelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Dari aspek pendidikan dan kesehatan dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat mengentas kemiskinan.⁹

Seperti yang sudah dijelaskan tujuan dari PKH yakni meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengentas kemiskinan. Namun, pada kenyataannya kemiskinan di Kecamatan

⁹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Pererbit Erlangga : 2011), h. 449.

Silih Nara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya indikator PKH yakni tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Dari hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat PKH tidak tepat sasaran, seperti ada beberapa penerima yang memiliki kebun, kendaraan, dan rumah yang cukup layak.

Kemudian untuk jumlah penerima PKH sejak awal diberikan bantuan pada tahun 2015 hingga tahun 2017 tidak mengalami peningkatan atau pengurangan jumlah penerima, namun tetap konstan yakni sebanyak 1200 penerima manfaat. Hal ini dikarenakan data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dengan data tingkat nasional dengan menggunakan data pada tahun sebelumnya atau data yang digunakan tidak valid, sedangkan ketika ada peralihan status pada RTM di daerah harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima bantuan.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang timbul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di Kecamatan Silih Nara masih tinggi
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang terampil merupakan penyebab kemiskinan
3. Rendahnya keberhasilan dari program penanggulangan kemiskinan
4. Penanggulangan kemiskinan saat ini masih berorientasi material dan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran pemerintah

5. Belum optimalnya tugas pendamping dalam melakukan pemutakhiran data RTSM yang akan menerima bantuan PKH

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian, maka penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara?
2. Bagaimana dampak dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara?
3. Faktor apakah yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara ?
4. Apakah sudah efektif atau tidak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara
- b. Untuk menganalisis bagaimana dampak dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara

- c. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara
 - d. Untuk menganalisis efektifitas pada Program Keluarga Harapan (PKH) untuk pemerataan dan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara
2. Manfaat Penelitian
- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang social melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya.
 - 2) Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai kinerja Dinas Sosial khususnya pada Staf Jaminan Sosial tentang mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Silih Nara.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Bagi Kepala Jaminan Sosial diharapkan penelitian dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam menanggulangi kemiskinan.
 - 2) Bagi penulis memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman.
 - 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bantuan PKH dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Silih Nara.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan.¹⁰

Selain itu, memahami kemiskinan secara multidimensional pada prinsipnya standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya.¹¹

2. Bentuk – Bentuk Kemiskinan

Penduduk miskin hidup tanpa adanya kebebasan pokok dan pilihan yang lebih baik. Mereka sering kali tidak cukup dalam hal makanan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan, perbedaan dalam rasa aman seperti layaknya orang hidup. Mereka juga rentan terhadap penyakit, dan ekonomi yang buruk. Masyarakat miskin seringkali mendapatkan perlakuan buruk oleh Negara dan kurangnya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan

¹⁰ Yani Afdillah, Isnaini Harahap, Marliyah, *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, (Medan: Febi UIN-SU Press, Cetakan Pertama, 2015, h.48.

¹¹ Crisdawani Suryawati, Memahami Kemiskinan secara Multimendisional, dalam jurnal Ilmu Sosial, h. 11

keputusan. Hal tersebut merupakan dimensi dari kemiskinan.¹² Ada empat bentuk kemiskinan, diantaranya adalah:

a. Kemiskinan Pendapatan

Kemiskinan pendapatan adalah seseorang dikatakan miskin jika dan hanya pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sebagai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya makan.

b. Kemiskinan Manusia

Kemiskinan manusia diartikan dengan menggambarkan melalui tiga perspektif kemiskinan-pendapatan, kebutuhan dasar dan kapabilitas dan merumuskannya dalam satu indeks kemiskinan manusia, yakni: tingkat umur, pengetahuan, dan standar hidup layak.

c. Kemiskinan Kebutuhan Dasar

Kemiskinan kebutuhan dasar yaitu kemiskinan yang merupakan ketiadaan kebutuhan material untuk mencukupi kebutuhan minimal hidup termasuk makan.

d. Kemiskinan Kemampuan

Kemiskinan kemampuan yaitu kemiskinan kapabilitas yang merupakan tidak adanya kemampuan dasar untuk berfungsi sebagai manusia karena tidak adanya kesempatan untuk mencapainya.¹³

3. Penyebab Kemiskinan

Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.

¹² World bank, *Global Development finance, 1998* (Washington, Dc, World 1998)

¹³ Yani Afdillah, Isnaini Harahap, Marliyah. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, h . 52.

- b. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu Negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda setiap Negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas usia maksimum.
- c. Tingkat pendidikan rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu Negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.
- d. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

4. Ukuran Kemiskinan

Penetapan pengukuran dan kriteria kemiskinan secara nasional sangat sulit. Masih diperlukan kajian yang dapat mengakomodasikan permasalahan kemiskinan yang kompleks baik dari segi ekonomi, budaya, social, psikologi, dan geografi yang sangat bervariasi di Indonesia. Hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi yang di motori oleh Bank Dunia.

Ada beberapa metode tingkat pengukuran kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, antara lain:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa

makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari. Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologi penduduk.

- b. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari Rp.8.500 per hari.¹⁴

Sedangkan menurut Sayogyo tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disertakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

- a. Daerah pedesaan:

- 1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

- b. Daerah perkotaan:

- 1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- 3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.¹⁵

5. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi para pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya berzakat, berinfak, membiayai peperangan, diperintahkan untuk

¹⁴ Criswardani Suryati, "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional" dalam jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, vol.08, no.03, 2005, h. 3.

¹⁵ *Ibid.* h. 4.

menjalankan haji dan sebagainya. Bagaimana mungkin umat Islam mampu melakukan semua perintah tersebut bila hidup dalam kemiskinan, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلُمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan) (Q.S Al-Anfal: 60).¹⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ajaran Islam itu mendorong masyarakatnya untuk memiliki harta kekayaan dalam menghadapi musuh Islam. Kemiskinan adalah musuh besar umat Islam, mereka berkewajiban melawan kemiskinan yang menderanya. Allah SWT tidak pernah memerintahkan untuk menjadi orang miskin. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan akan membantu umatnya keluar dari segala kesulitan.

Seperti yang dijelaskan pada tafsir al-misbah Quraish Shihab “ (Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka) untuk memerangi mereka (kekuatan apa saja yang kalian sanggupi) Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu atau pasukan pemanah. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim)dan dari kuda-kuda yang ditambat), artinya kuda-kuda yang sengaja disediakan untuk berperang di jalan Allah SWT (untuk membuat takut) kalian membuat gentar (dengan adanya persiapan itu musuh Allah

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 185

dan Musuh kalian) artinya orang-orang kafir Mekah (dan orang-orang selain mereka) terdiri dari orang-orang munafik atau orang-orang yahudi (yang kalian tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya). Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalaskan kepada kalian dengan balasan yang cukup yakni pahalanya (dan kalian tidak akan dianiaya) tidak akan dikurangi sedikitpun dari pahala kalian.”

6. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Menurut Al-Qur'an

Problematika social yang kita hadapi di dunia ini, yang salah satunya adalah kemiskinan telah di wanti-wanti oleh Al-Qur'an. Sehingga sebenarnya Al-Qur'an telah melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi kemiskinan yang begitu luas di kalangan penduduk bumi ini. Maka dari itu, Al-Qur'an telah memberikan beberapa strategi/langkah-langkah untuk menanggulangi kemiskinan ini, diantaranya:

- a. Al-Qur'an menyeru untuk bekerja dan berusaha

Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalas-malasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja dan berusaha, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki Allah SWT. Seperti firman-Nya yang tertuang dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (Q.S Al-Jumu'ah:10).¹⁷

Ayat ini jelas menerangkan bahwa mencari kehidupan ukhrawi itu lebih utama, yaitu dengan cara taat kepada Allah SWT, namun tidak boleh bagi kita melupakan kehidupan dunia.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 555

b. Hidup hemat dan tidak berlebih-lebihan

Allah SWT melarang umatnya untuk berlebih-lebihan dalam segala hal. Allah SWT bahkan menyatakan bahwa orang yang suka berlebih-lebihan itu termasuk saudaranya syaitan. Allah SWT berfirman pada surat Al-Isra: 26-27

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ
 الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۗ ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (26). Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (27).¹⁸

Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudara setan karena suka mengikuti dan sangat penurut kepadanya. Orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya dalam perkara yang tidak mengandung ketaatan. Jika kita berlebih-lebihan di muka bumi ini maka akan terjadi kerusakan-kerusakan akibat keserakahan kita.

Seperti juga dijelaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad:

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كُلُّ وَاشْتَرَبَ وَالْبَسَ وَتَصَدَّقَ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ .

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 285

Dari Amr bin Sya'ab dari bapaknya dari kakeknya ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: “ Makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan menyombongkan diri “. (HR. Abu Daud dan Ahmad).¹⁹

- c. Mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat serta menyeru kepada sedekah

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat beriringan dengan perintah untuk mendirikan shalat. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S Al-Baqarah: 43).²⁰

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap individu untuk mendistribusikan kelebihan kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang lebih membutuhkan.

B. Kesejahteraan

1. Definisi Kesejahteraan

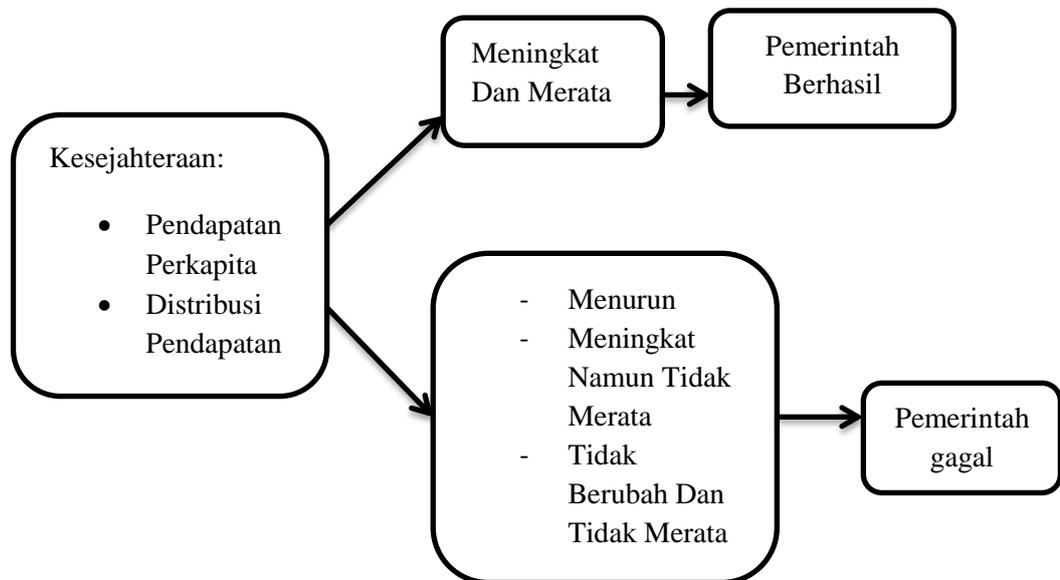
Kata “kesejahteraan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “sejahtera” yang berarti aman, sentosa, dan makmur. Sedangkan pengertian “kesejahteraan” itu sendiri adalah hal atau keadaan aman, damai, sentosa, selamat, kesenangan hidup, dan makmur.

¹⁹ Isnaini Harahap, Yenni Samri Julianti Nasution, Marliyah, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 84.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 8

Gambar 1

Tingkat Kesejahteraan



Untuk melihat tingkat kesejahteraan tersebut ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Absolute

Pendekatan ini melihat pada batas minimum yang harus dimiliki untuk mencapai kebutuhan minimum suatu keluarga. Melalui pendekatan ini akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin. Dengan batas minimum yang sama akan dapat diperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Kelemahan pendekatan ini adalah pada kenyataan bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama karena tergantung pada tempat dan waktu. Namun demikian pendekatan ini masih banyak digunakan terutama terkait dengan perbandingan jumlah penduduk miskin.

b. Pendekatan Relatif

Pendekatan ini membandingkan antara pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Pendekatan ini

lebih melihat pada ketidakseimbangan pendapatan. Selama ketidakseimbangan pendapatan ada maka kemiskinan akan tetap ada.

c. Pendekatan Kebutuhan Dasar

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas kehidupan manusia. Melalui pembangunan, kemakmuran, taraf hidup dan lapangan kerja baru bisa menjadi lebih baik, sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.²¹

Pendekatan ini yang dikemukakan oleh Townsend menekankan pada dua unsur penting, yaitu: Pertama, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi pendapatan yang tidak dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan subsistensi pangan, papan, pakaian, dan barang-barang rumah tangga tertentu. Kedua, pendapatan tersebut juga tidak dapat memenuhi jasa-jasa penting lainnya, seperti air minum yang aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.²²

2. Indikator Kesejahteraan

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator, diantaranya:

- a. Rasa aman (*security*)
- b. Kesejahteraan (*welfare*)
- c. Kebebasan (*freedom*)
- d. Jati diri (*identity*)

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan,

²¹ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan : Pendekatan Transdisipliner*, (Medan : Perdana Publishing, 2018). h. 32

²² Yani Afdillah, Isnaini Harahap, Marliyah. *Analisis Tingkat Kesenjangan Pendapatan Pada Masyarakat Tebing Tinggi*, h . 50.

kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.²³ Adapun menurut Kolle kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan, yaitu antara lain:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan, dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

3. Tujuan Kesejahteraan

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama melalui teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola masyarakat serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.²⁴

Menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan mempunyai tujuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi social yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-

²³ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, (dalam jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2011), h. 5.

²⁴ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Amzah, 2016), h. 37.

sumber daya, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.²⁵

C. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT), ini terbukti cukup berhasil dengan menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.²⁶

Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan social dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan social lainnya yang merupakan program komplementer yang berkelanjutan.²⁷

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86 persen dari total penduduk sebanyak 28,01 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8

²⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), h. 10.

²⁶ Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ,(Kementrian Sosial Republik Indonesia:2019).

²⁷ *Ibid.*

persen pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang berat badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Pertama.

1. PKH Aspek Kesehatan

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan. Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia

2. PKH Aspek Pendidikan

Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama. Tanpa perhatian khusus pemerintah anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penyalahan obat terlarang sampai dengan kriminalitas.

Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan/ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak tidak jelas,

menyebabkan banyaknya pengangguran di masa mendatang, dan di masa mendatang anak akan cenderung berpikiran lebih mementingkan adat/budaya dari pada pendidikan.

3. PKH Aspek Kesejahteraan Sosial

a. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan kedisabilitasnya dari pihak lain terutama pengasuhan dan perawatan dan keluarganya.

b. Lanjut Usia

Berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, lanjut usia merupakan seseorang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Perbaikan perawatan dan penyediaan fasilitas kesehatan serta semakin baiknya gizi masyarakat selama tiga dekade terakhir berdampak pada usia harapan hidup penduduk Indonesia yang membawa konsekuensi meningkatnya jumlah lanjut usia dari tahun ke tahun. Semakin panjangnya usia harapan hidup dapat berimplikasi pada timbulnya permasalahan social yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikologis, social, dan ekonomi sehingga permasalahan jumlah lanjut usia terlantar akan cenderung meningkat.

4. Tujuan dan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga Harapan memiliki tujuan, diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- 5) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

b. Sasaran Program Keluarga Harapan

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social. Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social yang berada di wilayah sebagai berikut:

- 1) Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) Daerah terpencil/tertinggal.
- 3) Perbatasan antar Negara.²⁸

5. Kriteria Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Kriteria komponen penerima bantuan social PKH adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 1) Ibu hamil/menyusui
 - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun
- b. Kriteria komponen pendidikan
 - 1) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
 - 2) Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat
 - 3) Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
 - 4) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

²⁸ Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial Republik Indonesia:2018).

c. Kriteria komponen kesejahteraan social meliputi:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 tahun
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas yang berat.

6. Hak dan Kewajiban KPM PKH

a. Hak KPM PKH

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- 1) Menerima bantuan social
- 2) Pendampingan social
- 3) Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan social
- 4) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

b. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal, diantaranya:

- 1) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan enam (enam) bulan
- 2) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun
- 3) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan social sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang disabilitas
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

7. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH

Mekanisme penyaluran bantuan social PKH secara non tunai meliputi:

- a. Pembukaan rekening penerima bantuan social
- b. Sosialisasi dan edukasi
- c. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Proses penyaluran bantuan social PKH
- e. Penarikan dana bantuan social (PKH)
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan social PKH
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan social.²⁹

8. Besaran Bantuan

Table 5
Komponen Bantuan PKH

No	Komponen bantuan	Nominal bantuan (Rp)/3 Bulan
1.	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp. 2.400.000
2.	Bantuan anak usia dini	Rp. 2.400.000
3.	Bantuan peserta pendidikan SD/ sederajat	Rp. 900.000
4.	Bantuan peserta pendidikan SMP/ sederajat	Rp. 1.500.000
5.	Bantuan peserta pendidikan SMA/ sederajat	Rp. 2.000.000
6.	Bantuan penyandang disabilitas	Rp. 2.400.000
7.	Bantuan lanjut usia 60 tahun keatas	Rp. 2.400.000

Sumber: keputusan Dinas Sosial RI tahun 2019

9. Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan

a. Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya

²⁹ *Op.Cit*, h.8.

suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

b. Ukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) didefinisikan sebagai pengukuran terhadap sejauh mana keberhasilan pelaksanaan PKH dalam memberikan kontribusi untuk membantu RTM, indikator-indikator variabel ini dapat diukur sebagai berikut:

1) Indikator Tepat Sasaran

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program ketepatan sasaran sangatlah diperlukan. Ketepatan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara umum, sasaran memiliki pengertian yaitu segala sesuatu yang dicapai dan dihasilkan oleh instansi atau pihak tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan kegiatan/program, karena memberikan ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah peserta PKH yang sudah dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan PKH.

2) Indikator Tepat waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan. Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Pencairan dana harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing *stakeholders* harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam pencairan bantuan social khususnya PKH dapat tersalurkan tepat waktu. Peran dari masing-masing *stakeholder* memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3) Indikator Tepat Jumlah

Ketepatan jumlah dana yang disalurkan merupakan salah satu komponen yang juga penting agar program yang dijalankan dapat berjalan secara efektif. Tepat jumlah artinya dana atau bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh pemerintah.

D. Kajian Terdahulu

Table 6
Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Aprilia Saraswati (2018)	Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon	Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Pekon Pandansurat. Dengan adanya PKH pendidikan dan kesehatan masyarakat Pekon

		<p>Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)</p>	<p>Pandansurat dapat terpenuhi dan dapat mengurangi angka kemiskinan meski pengaruhnya hanya 8.3%. Hanya saja PKH di Pekon Pandansurat penyaluran bantuan PKH belum tepat sasaran terlihat dari penerima bantuan PKH sudah ada yang sejahtera dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini dikarenakan data yang digunakan untuk penetapan penerima bantuan ditentukan dengan data ditingkat nasional dengan menggunakan data pada tahun sebelumnya/data yang digunakan tidak valid, sedangkan ketika ada peralihan status pada RTM di daerah harus melalui proses panjang agar bisa digantikan atau dihapus dari daftar penerima bantuan. selain adanya peserta yang beralih status menjadi keluarga sejahtera ditemukan pula peserta</p>
--	--	---	--

			yang berasal dari keluarga sejahtera yang merupakan kerabat-kerabat dekat dari pejabat aparat desa. Hal ini jelas membuktikan masih dijunjungnya budaya nepotisme.
2	Yudid B.S.Tlonaen, Willy Tri hardianto, Carmia Diahloka (2014)	Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik sampai sekarang ini. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Lowokwaru sudah sangat baik khususnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan anak Rumah tangga sangat miskin.
3	Dyah Ayu Virgoreta, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2017)	Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu,	Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan peserta PKH untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan taraf kesehatan secara optimal. Dalam kondisi sehat anak

		Kabupaten Tuban)	<p>akan siap memasuki pendidikan. Dengan pendidikan terjadi perubahan ke arah perbaikan SDM. Perbaikan SDM untuk jangka panjang akan memutus tali rantai kemiskinan. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Terbukti dengan menurunnya jumlah peserta PKH dari 158 pada tahun 2007 dan menurun dari tahun ketahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut setidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.</p>
4	Farida Umaroha, Sri Sutjiatmi (2018)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kupu Kecamatan	<p>Pelaksanaan Kegiatan Program Keluarga Harapan jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH diantaranya yaitu: penetapan rumah tangga</p>

		Dukuhturi Kabupaten Tegal	sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pelaksanaan pemutakhiran data KPM, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi komitmen fasilitas pendidikan (fasdik), fasilitas kesehatan (faskes) dan kesejahteraan sosial. Aspek- aspek tersebut sudah dilaksanakan oleh pendamping PKH yang ada di Desa Kupu.
5.	Siti Paisah (2019)	Analisis Efektivitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Lingga Bayu yang dimulai sejak tahun 2014 sampai sekarang ini yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah di Kecamatan Lingga Bayu kurang terlaksana secara

			<p>efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan/penetapan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/menanggulangi kemiskinan yang ada Khususnya di Kecamatan Lingga Bayu. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lingga Bayu maka terlihat bahwa ada beberapa hambatan yang dirasakan oleh pendamping dan peserta PKH antara lain: banyaknya pengaduan dari masyarakat yang tidak memperoleh bantuan atau tidak menjadi peserta PKH,</p>
--	--	--	--

			belum adanya kesadaran dari peserta, dan pencairan bantuan PKH yang sering tidak tepat waktu.
--	--	--	---

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Penelitian kualitatif harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan nilai terikat.³⁰

Penulis mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelitian untuk memaparkan fenomena alamiah yang terjadi berdasarkan teori yang ada. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan tentang Program Keluarga Harapan untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Kecamatan Silih Nara merupakan wilayah tertinggal yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.,

³⁰ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU Press), 2016, h.4.

dimana wilayah tertinggal merupakan salah satu sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember tahun 2019 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari hasil wawancara (*interview*). Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu warga Kecamatan Silih Nara yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti akan melakukan wawancara kepada warga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sampel sumber data.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini metode observasi digunakan agar pokok permasalahan dapat diteliti secara langsung di Kecamatan Silih Nara.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.³¹ Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang dianggap relevan dengan penelitian ini, terutama yaitu

³¹ *Ibid*, h. 52

penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silih Nara. Agar wawancara lebih valid peneliti, merekam hasil wawancara untuk keperluan pengolahan data. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*guided interview*) yang dilakukan secara individual yakni wawancara peneliti dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silih Nara.

Untuk pertanyaan-pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada responden ialah mengenai pemahaman responden tentang PKH, jumlah bantuan yang diterima, ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan, dan dampak yang dirasakan oleh penerima bantuan PKH tersebut.

E. Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola. Analisis data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Kata-kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu digunakan.³² Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dalam hal ini adapun yang dapat dijadikan acuan penelitian yaitu Peraturan presiden nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan social secara non tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan social merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan social, jaminan social, pemberdayaan social, rehabilitasi social, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan social secara non tunak dilaksanakan

³² *Ibid*, h. 80

terhadap bantuan social yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan social.

Hal ini ditujukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan social serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keuangan inklusif Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan social dan subsidi disalurkan secara non tunai.³³

³³ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Silih Nara

a. Letak Geografis Kecamatan

Silih Nara merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh. Kecamatan Silih Nara memiliki sebanyak 33 Desa. Adapun letak geografis dan wilayah administrative Kecamatan Silih Nara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kute Panang
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Celala
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rusip Antara
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bies

Luas wilayah Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan peta administrative adalah 98 km², dan ketinggian di atas permukaan laut 900-1300 M dengan suhu udara rata-rata 19.0° C.

b. Ruang Lingkup Keadaan Kecamatan

1) Kondisi Sosial Ekonomi

Kecamatan Silih Nara terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Jawa, Gayo, dan Aceh. Tingkat kehidupan penduduk pada umumnya bergerak dibidang pertanian, peternakan, dan perdagangan industry kecil atau industry rumah tangga. Namun kegiatan perekonomian selama ini masih didominasi oleh sector perkebunan yakni seluas 5.850,3 Ha.³⁴ Dilihat dari pesatnya pertanian desa namun belum seutuhnya membuahkan hasil yang optimal, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang.

³⁴ Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tengah Silih Nara dalam angka 2019

Selain mengolah pertanian, masyarakat juga ada yang menjalankan peternakan seperti ayam, kambing, sapi walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kecamatan Silih Nara masih perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi umum baik sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pemanfaatan potensi-potensi yang ada dibutuhkan untuk kesejahteraan penduduk setempat.

2) Topografi

Secara keseluruhan kondisi topografi Kecamatan Silih Nara terdiri dari daratan dan pegunungan.

3) Penduduk

Adapun populasi penduduk di Kecamatan Silih Nara pada tahun 2018 mencapai 24.356 jiwa. Hal ini dapat dilihat melalui tabel berikut³⁵:

Table 7

Jumlah Penduduk Kecamatan Silih Nara

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	1.373	1.316	2.689
2	5-9	1.444	1.401	2.845
3	10-14	1.210	1.216	2.426
4	15-19	968	905	1.873
5	20-24	972	861	1.833
6	25-29	944	1.035	1.979
7	30-34	1.129	1.167	2.296
8	35-39	996	966	1.962
9	40-44	820	781	1.601
10	45-49	694	706	1.400
11	50-54	552	573	1.125

³⁵ BPS Silih Nara dalam angka 2019

12	55-59	423	444	867
13	60-64	263	293	556
14	65-69	212	215	427
15	70-74	105	117	222
16	75+	152	103	255
	Jumlah	12.257	12.099	24.356

Sumber: BPS Kecamatan Silih Nara dalam angka tahun 2019

4) Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan Negara.

Pendidikan bukan hanya tanggung jawab siswa dan tenaga pendidikan saja tetapi juga orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting bagi Negara-negara untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan seperti siswa, guru, proses belajar-mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjang lainnya harus terkoordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Dalam hal ini akan dilihat bagaimana sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Silih Nara. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 8**Sarana Prasarana Pendidikan Kecamatan Silih Nara**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD / MI	23
2	SMP / MTsN	6
3	SMA / MA	2

Sumber: BPS Kecamatan Silih Nara dalam Angka 2018

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa prasarana penunjang pendidikan di Kecamatan Silih Nara cukup baik untuk menunjang pendidikan masyarakat yang berdomisili di Kecamatan silih Nara.

5) Kesehatan

Untuk fasilitas kesehatan masyarakat Kecamatan Silih Nara memiliki prasarana seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Table 9**Jumlah sarana Prasarana Kesehatan Kecamatan Silih Nara**

No	Nama Desa	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Pustu	Polindes
1	Rutih	-	-	-	-	1
2	Genting Gerbang	-	-	-	1	-
3	Angkup	-	3	1	-	-
4	Remesen	-	-	-	-	-
5	Burni Bius	-	-	-	1	-
6	Wihni Bakong	-	-	-	1	-
7	Wih Porak	-	-	-	-	1

8	Arul Gele	-	-	-	1	1
9	Gunung Singit	-	1	-	-	1
10	Semelit Mutiara	-	-	-	-	1
11	Arul Kumer	-	-	-	1	-
12	Wihni Durin	-	-	-	-	1
13	Paya Beke	-	-	-	-	1
14	Jerata	-	-	-	-	1
15	Terang Engon	-	-	-	-	1
16	Simpang Kemili	-	-	-	-	-
17	Burni Bius Baru	-	-	-	-	1
18	Rebe gedung	-	-	-	-	-
19	Sanehen	-	-	-	-	1
20	Wih Pesam	-	-	-	-	1
21	Paya Pelu	-	-	-	-	1
22	Arul Putih	-	-	-	-	1
23	Arul	-	-	-	-	-

	Relem					
24	Tenebuk Kp.Baru	-	-	-	1	1
25	Reremal	-	-	-	-	1
26	Mulie Jadi	-	-	-	-	1
27	Bius Utama	-	-	-	-	-
28	Wih Sagi Indah	-	-	-	-	-
29	Mekar Indah	-	-	-	-	-
30	Wih Bersih	-	-	-	-	1
31	Arul Kumer Timur	-	-	-	-	-
32	Arul Kumer Barat	-	-	-	-	-
33	Arul Kumer Selatan	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	4	1	6	18

Sumber: BPS Kec. Silih Nara dalam Angka 2019

2. Gambaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silih Nara

a. Sejarah PKH di Kecamatan Silih Nara

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kemiskinan di Kecamatan Silih Nara pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi dan mengalami

peningkatan pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini membuktikan bahwa bentuk program pemerintah belum berjalan secara maksimal termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu keefektifan suatu program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar dilakukan penelitian. PKH di kecamatan Silih Nara sudah berlangsung sejak tahun 2013, dimana penyaluran bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.

Berikut ini adalah data penerima PKH di Kecamatan Silih Nara:

Table 10

Penerima PKH di Kecamatan Silih Nara per Desa

No	Nama Desa	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Rutih	21	58	58
2	Genting Gerbang	17	27	27
3	Angkup	23	23	23
4	Remesen	15	15	15
5	Burni Bius	16	16	16
6	Wihni Bakong	32	36	36
7	Wih Porak	18	18	18
8	Arul Gele	56	56	56
9	Gunung Singit	40	40	40
10	Semelit Mutiara	47	47	47
11	Arul Kumer	63	63	63
12	Wihni Durin	42	42	42
13	Paya Beke	29	29	29
14	Jerata	30	36	36
15	Terang Engon	28	30	30
16	Simpang Kemili	34	34	34
17	Burni Bius Baru	17	17	17
18	Rebe gedung	19	19	19

19	Sanehen	24	27	27
20	Wih Pesam	47	47	57
21	Paya Pelu	45	45	45
22	Arul Putih	58	58	58
23	Arul Relem	57	57	57
24	Tenebuk Kp.Baru	41	41	41
25	Reremal	37	46	50
26	Mulie Jadi	50	50	50
27	Bius Utama	26	26	34
28	Wih Sagi Indah	31	31	37
29	Mekar Indah	57	57	57
30	Wih Bersih	46	46	51
31	Arul Kumer Timur	62	62	62
32	Arul Kumer Barat	46	46	57
33	Arul Kumer Selatan	48	51	60
	Jumlah	1.222	1.296	1.349

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH di Kecamatan Silih Nara pada Tahun 2017-2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penerima bantuan PKH, oleh karena itu maka keefektifan program PKH di Kecamatan Silih Nara perlu dilakukan penelitian, apakah dengan adanya penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Silih Nara dapat menanggulangi masalah kemiskinan yang terjadi selama ini.

b. Implementasi PKH di Kecamatan Silih Nara

Program Keluarga Harapan yang ada di Kecamatan Silih Nara sudah berlangsung terhitung sejak tahun 2013, fakta yang ditemukan di lapangan adalah implementasi PKH tersebut masih belum sesuai dengan kriteria penetapan RTM penerima bantuan seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya masih

ditemukan peserta PKH yang di kategorikan sebagai keluarga sejahtera namun tercantum sebagai penerima bantuan tersebut. Bahkan banyak peserta penerima bantuan yang telah terdaftar selama lebih dari lima tahun.

3. Karakteristik Informan

Pada bagian ini karakteristik informan yang akan dibahas yaitu mulai dari usia, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai pokok masalah yang ingin penulis teliti. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Kecamatan Silih Nara dengan jumlah informan sebanyak 50 orang.

a. Usia Informan / Narasumber

Adapun usia narasumber dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 11

Data Informan Berdasarkan Usia

No	Usia Informan	Jumlah	Presentase
1	25-35 Tahun	20 orang	40 %
2	36-46 Tahun	20 orang	40%
3	>47	10 orang	20%
4	Total	50 Orang	100 %

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah narasumber/informan yang berusia 25-35 tahun sebanyak 20 orang atau 40%, kemudian narasumber yang berusia 36-46 tahun sebanyak 20 orang atau 40 %, sedangkan sebanyak 10 orang atau 20% merupakan narasumber yang berusia >47 tahun.

b. Berdasarkan Pekerjaan Informan

Pekerjaan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 12
Data Informan Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Informan	Presentase
1	Ibu Rumah Tangga	30 orang	60 %
2	Petani	10 orang	20 %
3	Buruh	10 orang	20 %
4	Total	50 orang	100 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebanyak 30 orang atau 60% informan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebanyak 10 orang atau 20% bekerja sebagai petani, dan 10 orang atau 20% menjadi pekerja buruh.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Informan

Tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini:

Table 13
Data Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	20 orang	40 %
2	SMP	20 orang	40 %
3	SMA	10 orang	20%
4	Total	50 orang	100 %

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa narasumber dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 20 orang atau 40%, selain itu narasumber dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 20 orang atau 40%, dan narasumber dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 10 orang atau 20%.

B. Pembahasan

1. Analisis dampak

Dilihat dari jawaban para informan, sejak adanya Program Keluarga Harapan terbukti lebih mensejahterakan para peserta penerima PKH. Mereka juga berharap agar PKH terus dilanjutkan karena sangat membantu masyarakat dalam menanggulangi keluarga miskin khususnya untuk membiayai pendidikan dan juga membantu mencukupi kebutuhan kesehatan keluarga mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Misri salah satu peserta PKH di Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa: “Sejak adanya PKH sangat membantu untuk sekolah anak saya, membeli perlengkapan-perengkapan sekolah anak-anak saya, Alhamdulillah sangat terbantu sekali.”³⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Eva Haryani yang merupakan salah satu peserta PKH di Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa:” sejak menerima bantuan PKH ekonomi keluarga saya sedikit terbantu terutama untuk anak-anak saya yang masih sekolah, dengan menerima bantuan PKH bisa memenuhi kebutuhan dan perlengkapan sekolah anak-anaknya, meski kadang di pergunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli beras dan lain-lain.”³⁷

Adapun hasil wawancara di Lapangan dengan Ibu Ida Syawalina yakni penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa:” Dengan adanya PKH ini sedikit membantu perekonomian keluarga sejak saya mengandung, uang yang saya dapat saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan saya khususnya bisa sedikit mencukupi gizi untuk anak dalam kandungan saya, seperti saya membeli susu untuk Ibu Hamil, membeli buah-buahan, dan lain sebagainya.”³⁸

Dari beberapa jawaban responden tersebut dapat dilihat bahwa dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan sudah dapat membantu dan berdampak positif bagi kesejahteraan keluarga yang menerima bantuan tersebut. Dimana para penerima sudah merasa sedikit terbantu dengan adanya bantuan PKH yang mereka terima selama ini. Adapun dampak yang dirasakan penerima, antara lain:

³⁶ Misri, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2020 , Pukul 16.30 WIB.

³⁷ Eva Haryani, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2020 , Pukul 17.30 WIB.

³⁸ Ida Syawalina, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2020 , Pukul 14.30 WIB

- c. Terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari
- d. Meringankan biaya pendidikan
- e. Membantu kesehatan balita, ibu hamil, dan ibu menyusui

Dengan demikian, program PKH dapat membantu penerima untuk meringankan biaya kehidupan sehari-hari.

2. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi PKH

a. Faktor Pendukung

1) Komunikasi

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pendamping dan peserta PKH dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat wajib bagi peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sebagai peserta PKH di rekeningnya. Dirasakan oleh peserta PKH pihak Dinas Sosial sudah melakukan komunikasi dengan peserta PKH sehingga dapat memberikan manfaat bagi para peserta penerima bantuan untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka.

*Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ratmi salah satu penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa “ Dari awal menerima bantuan sudah dilakukan sosialisasi dari pihak Dinas Sosial dan juga pendamping, mereka memberi tahu tujuan dari diberikannya bantuan ini dan digunakan untuk apa saja uang yang kami terima. Untuk pendamping juga rutin melakukan pertemuan dengan kami, dan selalu memberi informasi ketika dana bantuan akan dicairkan ”.*³⁹

Dengan demikian, proses sosialisasi telah dilakukan dengan baik dan benar secara rutin oleh pihak Dinas Sosial mengenai tujuan dari PKH. Para pendamping PKH juga senantiasa menginformasikan kepada penerima tentang waktu pencairan bantuan PKH tersebut, dan rutin melakukan pertemuan dengan penerima PKH.

³⁹ Ratmi, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2020 , Pukul 16.15 WIB

2) Pendampingan yang Maksimal

Adanya pihak pendamping merupakan sarana pendukung bagi para peserta PKH. Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan oleh pendamping dapat mendorong potensi keahlian peserta PKH bisa dikembangkan. PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengentaskan kemiskinan. Selain itu, adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Aceh Tengah melalui Dinas Sosial memberikan bayaran kepada pendamping, kemudian Pemerintah juga mengikutsertakan pendamping dalam kegiatan seminar, hal ini bertujuan agar menjadikan pendamping lebih profesional.

*Adapun hasil wawancara dengan Ibu Yanti salah satu penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa: "Selama ini pendamping selalu rutin mengadakan pertemuan walaupun hanya untuk memberi informasi bahwa dana bantuan sudah cair. Beberapa kali pendamping juga memberi arahan kepada kami dari seminar yang beliau ikuti."*⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pertemuan pendamping tidak hanya memberikan informasi mengenai waktu pencairan, akan tetapi pendamping PKH juga menyampaikan hasil seminar yang diikuti kepada penerima PKH.

b. Faktor Penghambat

1) Sikap Apatis

Watak dan juga sikap yang kurang baik atau apatis serta tidak bertanggung jawab dari peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh pendamping PKH. Hal ini menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari peserta PKH, akibatnya pencairan dana ke rekening peserta PKH tidak tepat waktu.

2) Data Tidak Akurat

⁴⁰ Yanti, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2020 , Pukul 17.30 WIB

Data di lapangan masih ditemukan adanya data peserta PKH yang tidak akurat, dimana penerima PKH tersebut tidak memenuhi kriteria yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai peserta penerima bantuan PKH. Hal ini terlihat bahwa ada beberapa penerima yang tidak layak untuk menerima bantuan tersebut namun datanya terdaftar sebagai penerima bantuan.

3) Kurangnya Fasilitas

Ruangan dan fasilitas untuk pendamping PKH yang terbatas bahkan bisa dikatakan tidak tersedia. Hanya ada tersedia fasilitas untuk Koordinator Kecamatan dan masih jadi satu lokasi dengan Kantor Camat itu sendiri. Sedangkan untuk pertemuan di Desa pendamping dan peserta penerima bantuan menggunakan fasilitas yang ada di Desa seperti Gedung Serba Guna atau Kantor Desa itu sendiri. Tentunya fasilitas yang tersedia juga sangatlah terbatas baik ruangan, meja, kursi, komputer, dan penunjang lainnya.

3. Analisis Efektivitas Implementasi PKH

a. Indikator Tepat Sasaran

Tepat sasaran yaitu dilihat dari adanya kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang telah ditentukan. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan program dapat berjalan dengan efektif. Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada rumah tangga miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sasaran merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan/program, karena memberikan ukuran berhasil atau tidaknya suatu kegiatan/program yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Silih Nara terdapat penyimpangan yaitu adanya masyarakat yang dulunya menjadi peserta PKH namun sekarang kondisinya sudah membaik secara ekonomi tetapi masih terdaftar sebagai peserta PKH. Terkait hal ini, pendamping PKH maupun dari Dinas Sosial tidak bisa menghapuskan

data tersebut sebagai peserta PKH karena data tersebut diperoleh dari BPS yang kemudian diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lalu diserahkan kepada kementerian Sosial, sehingga pendamping maupun Dinas social tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau mengeluarkan peserta PKH.

Kejadian ini juga berlaku sebaliknya, yaitu apabila masyarakat miskin yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pkh namun tidak mendapatkan bantuan maka pendamping maupun Dinas Sosial juga tidak bisa berbuat banyak. Pendamping hanya bisa memberikan pengertian untuk bersabar agar datanya dapat tercatat di BPS sehingga bisa diolah oleh TNP2K untuk menjadi calon peserta PKH.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Firahma yang merupakan penerima PKH di Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa:” Awalnya untuk penerima PKH di Desa ini sudah merata, namun semakin kesini ada beberapa penerima yang bisa dikatakan sudah membaik keadaan ekonominya namun tetap menerima bantuan tersebut. Kemudian juga ada beberapa penerima yang kategori pendidikan misalkan anak nya sekolah SMA kemudian sudah lulus seharusnya sudah tidak menerima lagi, tetapi masih tetap menerima bantuan ini. Saya rasa ini tidak efektif, dan tidak tepat sasaran.”⁴¹

Dari hasil wawancara di atas , dapat diketahui bahwa terdapat beberapa penerima bantuan yang dikatakan telah mampu mencukupi kebutuhan hidupnya namun masih tetap menerima bantuan tersebut. Sedangkan untuk masyarakat yang justru layak menerima bantuan namun tidak terdaftar di data penerima PKH ini.

Sedangkan menurut Ibu Erna yang merupakan pendamping PKH untuk Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa:” Untuk penerima bantuan PKH di Kecamatan Silih Nara saya rasa belum tepat sasaran 100%, karena masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan dan sudah memenuhi kategori nya justru namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ini, contohnya saja pasangan yang baru menikah yang keadaan ekonominya kurang baik.

⁴¹ Firahma, peserta PKH Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020 , Pukul 15.00 WIB

*Nah, untuk mencantumkan keluarga tersebut sebagai penerima bantuan itu memerlukan proses yang sangat panjang, belum lagi banyak masyarakat yang acuh dengan hal ini, untuk melengkapi syarat-syarat agar bisa di data mereka tidak mau berharap ada yang mau mengurus begitu tidak mau berusaha. Kemudian juga untuk sebagian keluarga yang sudah baik keadaan ekonominya namun masih menerima bantuan kami menyarankan untuk mengundurkan diri namun mereka tidak mau dengan alasan repot harus menyiapkan berkas ini itu. Sehingga di beberapa desa PKH ini masih belum tepat sasaran.*⁴²

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa terdapat sikap masyarakat yang acuh, kemudian untuk beberapa penerima yang sudah dikatakan tidak layak menerima bantuan tetapi tidak mau mengundurkan diri dari data penerima bantuan PKH tersebut.

*Adapun menurut Bapak Eko yang merupakan penerima PKH di Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa:” Menurut saya ya sudah merata lah, sudah tepat sasaran, seperti keluarga saya ini yang menerima bantuan dan keluarga lain mungkin ada yang keadaan ekonominya lebih baik dari keluarga saya juga menerima. Saya juga kurang paham bagaimana sebenarnya kategori untuk penerima bantuan PKH ini.*⁴³

*Kemudian menurut Ibu Umayyah penerima PKH di Desa Arul Gala, mengatakan bahwa:” Kalau menurut saya belum tepat sasaran, karena banyak dari penerima bantuan PKH ini bukan dari keluarga yang kekurangan malinkan berkecukupan tetapi ia tetap menerima saya juga tidak mengerti mengapa seperti itu. Saya rasa data masyarakat penerima PKH ini sudah data yang sangat lama sekali, jadi misalnya ada masyarakat yang sudah mampu saat ini pun tetapi masih menerima bantuan.*⁴⁴

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwasanya, banyak sekali penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh data penerima bantuan yang tidak di evaluasi sehingga penerima bantuan PKH hingga bertahun-tahun merupakan keluarga yang sama.

Hasil yang sama juga dikatakan oleh Ibu Eva Haryani yang merupakan penerima PKH dan juga selaku Ketua penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa:” kalau ditanya apakah

⁴² Erna, pendamping PKH Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020 , Pukul 10.00 WIB

⁴³ Eko, penerima PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020 , Pukul 08.30 WIB

⁴⁴ Umayyah , penerima PKH Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020 , Pukul 16.30 WIB

sudah tepat sasaran saya rasa belum, karena ada beberapa yang menurut saya tidak layak menerima bantuan ini, namun memang untuk proses pengunduran diri itu melalui proses yang panjang dan diharuskan menyiapkan beberapa berkas, saya rasa tidak terlalu sulit. Namun sebagian masyarakat sangat cuek terhadap hal ini, mereka hanya tau beres saja namun tidak mau berusaha, begitupun untuk keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan PKH ini tetapi tidak mau mengajukan berkas agar terdata sebagai penerima PKH.”⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Silih Nara masih terdapat permasalahan sehingga indikator tepat sasaran dikatakan tidak efektif.

b. Indikator Tepat Waktu

Tepat waktu merupakan jangka waktu pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pelaksanaan program PKH proses pencairan dana bantuan harus dicairkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat menentukan efektif atau tidaknya program tersebut. Ketepatan waktu dalam pencairan bantuan PKH sangat diperlukan, mengingat bantuan social yang diberikan setiap tiga bulan sekali kepada masing masing peserta PKH.

Pencairan dana PKH dilakukan dengan mengirimkan uang dari pihak Bank ke rekening masing-masing peserta PKH, sehingga peserta PKH dapat mengambil uangnya sendiri di ATM. Ketepatan waktu dalam pencairan dana bantuan PKH sangat penting, mengingat pencairan dana bantuan social harus sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Masing-masing *stakeholders* harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, sehingga pencairan dana PKH dapat tersalurkan tepat waktu. Peran masing-masing *stakeholders*

⁴⁵ Eva Haryani , penerima PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2020 , Pukul 16.30 WIB

memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

*Menurut wawancara dengan Ibu Erna yang merupakan pendamping PKH Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa: " untuk masalah pencairan dana memang di tahap awal mengalami keterlambatan, hal ini karena pada masa itu jumlah pendamping yang masih sedikit dan kami juga memiliki beban kerja yang banyak sehingga sering terjadi keterlambatan kami untuk melaporkan ke pusat mengenai pencairan dana. Ini berlangsung hingga tahap kelima pencairan dana. Untuk tahap selanjutnya saya rasa sudah relative stabil pencairan dananya. "*⁴⁶

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk waktu pencairan dana bantuan PKH di tahap awal mengalami keterlambatan dikarenakan masih sedikitnya jumlah pendamping. Namun, untuk selanjutnya sudah relatif stabil tetapi belum bisa dikatakan tepat waktu karena jadwal pencairannya tidak selalu pada tanggal yang sama setiap 3 bulannya.

*Menurut wawancara dengan Ibu Misri yang merupakan penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa: "kalau pencairannya tidak menentu waktunya. Pada tahap awal kalau tidak salah pada waktu itu di awal bulan, kemudian hampir selama satu tahun tidak cair, kemudian cair dengan jumlah tiga kali pencairan, kemudian sampai saat ini jadwal pencairan tidak menentu kadang di awal bulan kadang pertengahan kadang juga di akhir. "*⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa waktu pencairan dana bantuan tidak tepat waktu. Bahkan untuk tahap awal selama satu tahun bantuan tersebut tidak cair. Kemudian dana bantuan tersebut cair dengan jumlah tiga kali lipat. Hal ini dirasa tidak efektif bagi penerima bantuan PKH.

*Adapun menurut Ibu Firahma yang merupakan penerima PKH di Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa: " Untuk pencairan dana nya tidak pernah tepat waktu, artinya selalu berubah berubah setiap per tiga bulannya, kadang ya cepat kadang juga lama di akhir bulan. "*⁴⁸

⁴⁶ Erna, pendamping PKH Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020 , Pukul 10.00 WIB

⁴⁷ Misri, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2020 , Pukul 16.30 WIB.

⁴⁸ Firahma, peserta PKH Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020 , Pukul 15.00 WIB

Jawaban yang serupa juga di kemukakan oleh Ibu Maisarah, Ibu Saniah, dan Ibu Nurhayati yang merupakan penerima PKH di Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, mereka mengatakan bahwa:” Kalau pencairan dana nya tidak tentu waktunya,pasti selalu berubah, sering nya sih di akhir bulan, jadi kalau menurut kami bisa dikatakan tidak konsisten begitu.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pencairan dana bantuan dari Program Keluarga Harapan masih belum efektif dan bisa dikatakan tidak tepat waktu. Dengan adanya permasalahan seperti ini, banyak dari masyarakat yang tidak terima apabila terjadi kemoloran pencairan dana bantuan PKH tersebut.

c. Indikator Tepat Jumlah

Dalam menyalurkan bantuan social sebaiknya diperlukan kesesuaian jumlah bantuan yang telah ditentukan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ibu Misri penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa:” Jumlah bantuan yang pertama kali saya dapat itu sebese Rp. 600.000, kemudian tidak ada keluar selama hampir satu tahun, setelah itu cair sebanyak Rp.1.500.000. untuk tahap selanjutnya tidak menentu berapa jumlahnya. Saya tidak tahu berapa jumlah yang ditetapkan pemerintah, sejak awal juga tidak diberitahu oleh pendamping, tidak tahu saya kalau ibu hamil berapa, anak sekolah SD berapa, SMP dan SMA berapa. Kadang saya dengan penerima lain jumlah nya sama kadang berbeda, jadi tidak menentu.”⁵⁰

Adapun dilihat dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwasanya masyarakat penerima bantuan tidak mengetahui dengan pasti berapa jumlah bantuan yang seharusnya mereka terima. Hal ini disebabkan oleh pendamping yang kurang detail dalam menjelaskan mengenai jumlah dana bantuan PKH tersebut.

Jawaban yang hampir sama dari hasil wawancara dengan Ibu Ida peserta PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa:” selama ini jumlah bantuan nya tidak sama, tahap pertama saya dapat

⁴⁹ Maisarah, Saniah, Nurhayati, peserta PKH Desa Arul Gala Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 14 Juni 2020, Pukul 13.15 WIB

⁵⁰ Misri, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 12 Juni 2020 , Pukul 16.30 WIB.

Rp.300.000 kemudian tahap kedua Rp.500.000, untuk selanjutnya pun jumlahnya berbeda-beda. Saya tidak tahu berapa jumlah sebenarnya dan tidak pernah diberi tahu juga seingat saya.”⁵¹

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Eva yang merupakan penerima bantuan sekaligus ketua penerima PKH di Desa Gunung Singit, mengatakan bahwa:” Jumlah bantuannya karna saya untuk anak SMP itu Rp. 600.000 dan anak SMA Rp. 900.000. Kadang pernah juga gak sampai segitu, ya sering berbeda juga jumlahnya. Tapi yang saya ketahui memang setiap kategori seperti kesehatan Ibu hamil dan anak usia dini, pendidikan SD, SMP, SM, kemudian lansia dan penyandang disabilitas itu jumlah bantuannya berbeda-beda.”⁵²

Adapun hasil wawancara lainnya dengan Ibu Umadiyah peserta PKH di Desa Arul Gala, mengatakan bahwa:” Dulu pertama kali dapat bantuan itu Rp.500.000 setau saya semua penerima rata mendapatkan jumlah segitu. Untuk tahap selanjutnya saya mendapatkan Rp.1.500.000 tahap selanjutnya kalau saya tidak salah ingat itu Rp.1.200.000, saya tidak tahu kalau penerima yang lain. Saya juga merasa mungkin ada pemotongan sebelum diberikan kepada kami.”⁵³

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa jumlah bantuan yang diterima pada tahap awal pencairan adalah dengan jumlah yang sama untuk setiap penerima. Hal ini tentu tidak efektif karena seharusnya setiap kategori penerima bantuan ini mendapatkan jumlah yang berbeda.

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh Ibu Sariwen dan Ibu Asmawati yang merupakan penerima bantuan PKH di Desa Wihni Durin Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa:” Untuk jumlah uang yang kami dapatkan itu jumlah nya tidak tetap, pernah berkurang dan bertambah, tidak selalu sama jumlahnya. Terkadang kalau dapat bantuan nya sedikit ya masih kurang untuk anak sekolah belum lagi untuk makan sehari-hari.”⁵⁴

Adapun dari jawaban wawancara di atas diketahui bahwa jumlah dana bantuan yang diterima tidak dalam jumlah yang tetap, sehingga

⁵¹ Ida, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2020 , Pukul 17.40 WIB.

⁵² Eva, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 13 Juni 2020 , Pukul 17.00 WIB.

⁵³ Umadiyah, peserta PKH Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 15 Juni 2020 , Pukul 14.00 WIB.

⁵⁴ Sariwen, Asmawati, peserta PKH Desa Wihni Durin Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2020 , Pukul 10.00 WIB.

terkadang masyarakat masih kekurangan dalam mencukupi kebutuhan sehari hari.

Kemudian jawaban dari Ibu Husni penerima PKH di Desa Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara, mengatakan bahwa: "jumlah uangnya itu pada tahap satu sampai tahap tiga sama jumlahnya, kemudian untuk selanjutnya bertambah dari tahap-tahap sebelumnya sampai sekarang tetap seperti itu. Kalau ditanya apakah cukup, ya sering kali juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami",⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama ini pembagian Program Keluarga Harapan (PKH) belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah dan masih ada pemotongan dari pihak-pihak lain, terbukti dari perubahan jumlah bantuan disetiap pencairannya.

Skenario bantuan yang diterapkan selama ini belum mencerminkan adanya keadilan. Sehingga bantuan yang dikucurkan sering menimbulkan kesenjangan antar peserta PKH dengan komposisi anggota rumah tangga dan beban pendidikan yang berbeda-beda. Peserta PKH yang mempunyai anak balita lebih dari satu dan yang mempunyai anak yang masih sekolah dibangku SD, SMP, SMA masih merasakan bahwa jumlah bantuan keuangan PKH belum mencukupi sehingga belum maksimal atau belum mencukupi sehingga tidak bisa membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya secara signifikan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Silih Nara belum efektif karena dilihat dari rata-rata jawaban informan untuk semua indikator keberhasilan PKH masih belum terlaksana dengan baik, sehingga Program Keluarga Harapan bisa dikatakan belum berhasil dalam mengatasi pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Silih Nara. Terbukti dengan adanya data yang diperoleh

⁵⁵ Husni, peserta PKH Desa Genting Gerbang Kecamatan Silih Nara, Wawancara Pribadi, 16 Juni 2020 , Pukul 13.00 WIB.

bahwasanya penduduk miskin di Kecamatan Silih Nara cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4. Implementasi PKH untuk Meningkatkan Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan dengan menerapkan sistem Ekonomi Islam adalah sistem yang menganut dan memasukkan nilai-nilai, norma, dan ajaran Islam sebagai unsur yang fundamental dalam mencapai kesejahteraan. Dalam implementasi PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh tengah perspektif Islam dapat dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam, yaitu:

a. Keadilan

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan konsisten pada kebenaran. Dalam implementasi PKH di Kecamatan Silih Nara dikatakan belum tepat sasaran dan juga belum merata, dikarenakan banyak penduduk miskin yang belum menerima manfaat dari bantuan tersebut. Jadi, implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) belum memenuhi prinsip keadilan.

b. Pertanggung jawaban

Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah, serta mewujudkan kemaslahatan. Serta memiliki tanggung jawab secara umum bukan hanya pribadi atau kelompok tertentu saja.⁵⁶ Dalam implementasi PKH di Kecamatan Silih Nara ada beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan juga tidak amanah dalam menjalankan tugasnya, sehingga bantuan PKH belum disalurkan secara tepat waktu dan tepat jumlah kepada pihak yang berhak menerima bantuan tersebut.

c. Tafaqul (Jaminan Sosial)

Adanya jaminan social di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat. Karena islam

⁵⁶ Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, h. 63.

mengajarkan hubungan vertical juga horizontal secara seimbang. Setiap warga Negara masyarakat mempunyai hak dan dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing.⁵⁷ Program Keluarga Harapan merupakan bentuk jaminan social pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut bahwasanya implementasi PKH di Kecamatan Silih Nara dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam sudah dapat dikatakan tanggung jawab, karena semua pihak yang sudah mengelola dan masyarakat dalam mewujudkan atau merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun belum bisa dikatakan adil karena prinsip keadilan dalam program ini belum terlaksana dengan baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan social bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai sebuah program bantuan social bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka.

Program sebagaimana yang dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dan bagi anggota keluarga (RTSM) diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan aspek teori Sondang P. Siagian mengatakan bahwasanya efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran,

⁵⁷ Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, h. 9

maka semakin tinggi efektivitasnya. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Kesesuaian antara teori dan praktek terjadi dalam pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Silih Nara jika dilihat dari proses pelaksanaan sudah sesuai dengan alur pelaksanaan PKH, yaitu: penetapan rumah tangga sasaran, proses sosialisasi, pelaksanaan pertemuan awal dan validasi, pembentukan kelompok keluarga penerima manfaat, pelaksanaan pemutakhiran data, pelaksanaan penyaluran bantuan dan pelaksanaan verifikasi fasdik, faskes, dan kesejahteraan social.

Meskipun pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah dilaksanakan oleh pendamping masing-masing di Kecamatan Silih Nara khususnya pada saat sosialisasi mengenai program tersebut yang bersamaan dengan pertemuan awal juga validasi. Akan tetapi, hal tersebut dirasa sangat kurang efektif untuk pemahaman masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan. Dikatakan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Silih Nara belum efektif karena melihat dari rata-rata jawaban responden yang merupakan peserta PKH masih belum puas terhadap pelaksanaan program tersebut, dimana masih belum tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Kemudian dalam penyaluran PKH tentu masih banyak timbul hambatan yang dihadapi dilapangan, baik dirasakan oleh pendamping PKH maupun masyarakat peserta penerima PKH.

Dilihat dari hasil penelitian ini maka memperkuat hasil-hasil dari penelitian sebelumnya. Dimana indikator keberhasilan Program Keluarga Harapan seperti: tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah belum efektif dilaksanakan. Sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan khususnya di Kecamatan Silih Nara belum terlaksana secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Pemerataan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Silih Nara adalah sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Silih Nara dimulai sejak tahun 2013 sampai saat ini yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan belum terlaksana secara efektif. Belum efektifnya program ini dikarenakan masih ditemukan kurang tepat sasaran dan tidak merata dalam penetapan peserta PKH, kemudian kurang efektifnya waktu pencairan dana dimana waktu pencairan dana tersebut sering terlambat dan tidak tepat waktu, serta jumlah dana bantuan yang diterima oleh peserta PKH tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang membuat program ini menjadi tidak sesuai dengan tujuan, sehingga belum dapat mengurangi kemiskinan yang ada di Kecamatan Silih Nara.
2. Dampak yang dirasakan oleh peserta penerima PKH juga belum maksimal, dilihat dari kondisi ekonomi mereka yang masih serba kekurangan, maka PKH ini dinilai kurang efektif dalam mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Silih Nara.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PKH yakni terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukungnya antara lain sudah maksimalnya sosialisasi dari pihak Dinas social dan juga para pendamping, hanya saja terdapat juga faktor penghambat diantaranya adalah: belum adanya kesadaran peserta, kurangnya pemahaman peserta, terbatasnya fasilitas pendukung, serta pencairan bantuan yang sering tidak tepat waktu.

4. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan kesejahteraan menurut Ekonomi Islam dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam yaitu:
 - a. Keadilan
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Tafaqul (Jaminan Sosial)

Berdasarkan data di lapangan PKH di Kecamatan Silih Nara dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam, ketiga nilai tersebut belum terpenuhi dengan baik. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat dari program ini.

B. Saran

1. Disarankan kepada Dinas Sosial dibidang Jaminan Sosial Program keluarga Harapan (PKH) agar dilakukan evaluasi serta monitoring yang lebih baik lagi, melakukan sosialisasi khususnya daerah tertinggal secara terarah dan rutin untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai program ini. Kegiatan sosialisasi tersebut harus diatur secara tegas dan sesuai dengan pedoman umum. Kemudian dalam penentuan peserta penerima bantuan diharapkan menggunakan data yang valid agar lebih tepat sasaran.
2. Disarankan kepada pendamping PKH harus lebih memberikan informasi secara jelas dan terperinci agar penerima lebih mengerti tujuan dan pemanfaatan bantuan PKH tersebut.
3. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah diterapkan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldino P.G Moch. Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah, skripsi Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2018
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I
- Ayu Virgoreta Dyah dkk. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Bije Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban), jurnal Administrasi Publik Universitas Brawijaya
- Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tengah Silih Nara dalam angka 2019
- Bagong Suyanto. Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya, Malang : In-Trans Publishing, 2013
- Baniadi Pandu. Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta, skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta, 2018
- Basyir, Abubakar Hamzah, dkk. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh. dalam Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
- Bi Rahmani Nur Ahmadi. Metodologi Penelitian Ekonomi, Medan : FEBI UINSU Press, 2016
- Delianorv. Pemikiran Perkembangan Ekonomi, Jakarta : Rajawali Press, 2010
- Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur'an dan Terjemahnya.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan.
- Fahrudin Adi. Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung : Refika Aditama, 2012
- Farida Umaroh dan Sri Sutjiatmi. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti.
- Harahap Isnaini, Yenni Samri Julianti Nasution, Marliyah, Hadis-hadis Ekonomi, Medan : Wal Ashri Publishing, 2015.
- Juoro Umar. Masalah Terdepan Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Bandung : Penerbit Alumni, 1985
- Kartasasmita Ginanjar. Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 1996

- Kuncoro Mudrajad. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Yogyakarta : YKPN, 2002
- Limbong Bernhard. *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Jakarta : Pustaka Margaretha, 2011
- Notowidagdo Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Jakarta : Amzah, 2016
- P.Todaro Michael, Smith Stephen. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid I*, Jakarta : Erlangga, 2011
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). *Kementrian Sosial Republik Indonesia*, 2019
- Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan (PKH). *Kementrian Sosial Republik Indonesia*, 2018
- Qanun RPI2JM Aceh Tengah Tahun 2016-2020
- Rismanuar Nuryitmawan Tegar. *Studi Komparasi Kemiskinan di Indonesia: Multidimensional Poverty dan Monetary Poverty*, jurnal Ilmu Ekonomi Terapan, 2016
- Rosni. *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2011
- Ruslan Abdul Ghafur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*
- Sahid Munawarah. *Pengaruh Kebijakan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011
- Suryati Criswardani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*, jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, vol.8 no.3, 2005
- Tlonaen B.S yudid dkk. *Implementasi Prpgram Keluarga Harapan (PKH) Umtuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*, jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Tribhuana Tungadewi, vol. 3, no. 1, 2014.
- Umaroh Farida, Sutjiatmi Sri. *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal*, jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti, 2018

Usman Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Wargadinata Wirdana. Islam dan Pengentasan Kemiskinan, Malang : UIN Maliki Press, 2011

World bank. Global Development finance. Washington, Dc. World 1998.

LAMPIRAN













RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Nurul Indah Sari
NIM : 0501162174
Tempat, Tanggal Lahir : Stabat, 09 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Desa Gunung Singit Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah

Pendidikan

SDN 5 Silih Nara : 2003-2008
MTsN 4 Takengon : 2009-2012
SMAN 1 Takengon : 2013-2016
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2017-2020